

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan disusun berdasarkan sumber-sumber informasi dalam perusahaan, salah satu informasi tersebut digunakan sebagai acuan mengenai laba perusahaan. Sedangkan laporan keuangan penting bagi para pihak eksternal (investor, kreditor, pemilik, pemerintah, serta masyarakat) selaku pemakai laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya pada saat ini sehingga dapat memprediksikan kondisi perusahaan di masa depan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Richardson (1998) menyatakan bahwa beberapa manajer menggunakan kebebasan dalam mengubah angka akuntansi terutama laba untuk keuntungan pribadi yang dapat mengurangi kualitas dan relevansi informasi, sehingga pemilik selaku pemegang saham menerima informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 1998).

Informasi yang memiliki pengaruh besar bagi pihak internal maupun eksternal yaitu terkait dengan laba dan seringkali informasi ini dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan pihak manajemen. Tindakan tersebut yang dikenal dengan manajemen laba (*earnings management*). Scott (1997) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan manajemen dalam proses

menyusun pelaporan keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan Fisher dan Resenzweig dalam Sulistyanto (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan dalam jangka panjang.

Tindakan manajemen laba memunculkan beberapa kasus pelaporan akuntansi dengan cara *illegal (financial fraud)* yang secara luas telah diketahui, antara lain Enron Corporation, Xerox Corporation, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, et al., 2008). Salah satu contoh kasus skandal pelaporan keuangan yang terjadi di Indonesia adalah PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk. Perusahaan ini diperkirakan melakukan *mark-up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001 (Boediono, 2005). Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur merupakan penopang utama dalam perkembangan industri di sebuah Negara (BAPEPAM, 2002). Oleh karena itu diharapkan perusahaan-perusahaan manufaktur tidak melakukan manajemen laba agar masyarakat, negara, dan pihak-pihak lainnya dapat menerima informasi yang sesuai dan dapat menilai kinerja perusahaan dengan baik dari pelaporan keuangan yang bebas dari manipulasi.

Langkah yang digunakan dalam rangka mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan tujuan perusahaan, maka diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian secara efektif yang dapat mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Selain itu dilakukan pemeriksaan

intern, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern perusahaan untuk membantu manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaan tata kelola praktik manajemen laba yang sering dilakukan manajemen dapat menurunkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan, selain itu tindakan ini dapat merugikan investor karena mereka akan memperoleh informasi yang tidak sesuai mengenai posisi keuangan perusahaan. Untuk mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba maka upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik, upaya tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan serta kewajaran dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sistem ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Wardhani dan Joseph, 2010).

Beberapa faktor yang dianggap mampu menjadikan upaya rekayasa manajemen laba ini dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi dan *auditing* yang masih lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya (Sulistyanto, 2008).

Manajemen laba sering dilakukan oleh pihak manajemen karena laba merupakan salah satu informasi potensial yang sangat penting baik untuk internal perusahaan maupun pihak eksternal. Laba juga berfungsi untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam

jangka panjang, dan untuk menaksir resiko investasi atau meminjamkan dana (Kirschenheiter dan Melumad, 2002).

Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dengan indikator yang terkait dengan dewan komisaris independen dan komite audit dalam meminimalkan manajemen laba tersebut. Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen demi kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Pertama, proporsi dewan komisaris independen sebagai salah satu komponen untuk memonitor manajemen laba. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris tersebut.

Dewan komisaris adalah pihak yang bertugas dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (dewan komisaris) dapat bertindak mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan pengarahan kepada manajemen. Dewan komisaris ini merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar tercipta perusahaan dengan tata kelola yang baik. Secara umum, dewan komisaris memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan untuk meningkatkan dewan komisaris yang independen maka dewan harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar

perusahaan (*outsider*). Beberapa pendapat menyatakan bahwa dewan komisaris diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manajemen yang bertindak mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi terhadap *earning management*.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembentukan komite audit berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit, sebagaimana diperbaharui dengan keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Peraturan mewajibkan perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan 30% anggota independen dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit memiliki peran penting dalam membantu dewan komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Adanya komite audit dalam suatu perusahaan akan mengurangi tindakan manajemen laba yang akan dilakukan oleh pihak manajemen.

Hal ini berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan, dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham. Kedua, karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dari komite audit. Berdasarkan fenomena dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan “Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian dimaksudkan untuk menjawab masalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam rumusan permasalahan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba
2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memilih saham untuk diinvestasikan berdasarkan faktor keefektifan dari fungsi komite audit yang sudah terbentuk dalam perusahaan manufaktur. Diharapkan dengan adanya bukti empiris dari penelitian ini, investor dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam dalam mengambil keputusan berinvestasi dengan tidak hanya melihat angka yang sebatas tertera dalam laporan keuangan sebaliknya melihat informasi karakteristik dewan komisaris yang

independen dan ukuran dari komite audit perusahaan sebagai nilai tambah dalam melihat informasi laporan keuangan.

2. Bagi regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertegas pentingnya fungsi dari dewan komisaris independen dan juga komite audit dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan sehingga tidak terjadi manajemen laba dengan melakukan pengawasan terhadap mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dilihat dari susunan posisi keuangan perusahaan tersebut.

3. Bagi manajemen

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman untuk mengurangi adanya manipulasi laba yang seringkali dilakukan oleh pihak manajemen sebagai akibat dari adanya asimetri informasi (*information asymmetric*) sehingga kualitas dan relevansi informasi tidak sesuai dengan kondisi perusahaan.

4. Bagi kalangan akademisi

Bukti empiris yang akan dihasilkan diharapkan lebih memperjelas fungsi dari laporan keuangan dan mengurangi terjadinya manajemen laba yang dilihat dari laba bersih serta arus kas dari kegiatan operasi sebagai indikator penting dalam komponen akrual untuk mengatur laba, sehingga pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian teoritis dan referensi.